



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : Karyadi
2. Jabatan : KEPALA PERWAKILAN
3. NHK : 402202

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.800.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 2.025.000.000
2. Bangunan Seluas 21 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 349 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
4. Tanah Seluas 27 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 825.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 746.850.000

1. MOTOR, Piaggio Piaggio Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 15.750.000
2. MOBIL, Nissan X-Trail Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 67.500.000
3. MOTOR, Honda Honda Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 2.250.000
4. MOTOR, Honda Honda Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 2.250.000
5. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 369.000.000
6. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 290.100.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 75.150.000



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	137.816.955
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.759.816.955
III. HUTANG	Rp.	438.867.142
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.320.949.813

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.